

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik adalah dengan sistem pembangunan ekonomi nasional (Amri, 2021). Untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut diperlukan sumber keuangan yang memberikan cukup kemampuan dan kekuatan kepada daerah yang bersangkutan (Pradhana, 2019). Upaya yang giat dilakukan dalam rangka pengembangan daerah dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu basis yang paling mendasar di daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan tersebut (Putra, 2020).

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 2022, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik adalah dengan sistem pembangunan ekonomi nasional (Amri, 2021). BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 2022 menjelaskan tentang tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, dan mengenai desentralisasi fiskal, dan menjelaskan pembagian baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah (Pemerintah Indonesia, 2022). Mengingat cukup pentingnya peran BUMD, maka BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya.

Sesuai dengan tujuan pendirian BUMD menurut PERPU Nomor 54 Tahun 2017, pendirian BUMD ditujukan untuk:

- 1) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;

- 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sesuai dengan tujuan pendirian BUMD menurut undang-undang, berikut penjelasan terkait fenomena yang menunjukkan fakta pada BUMD Kota Bandung berdasarkan berita pada salah satu artikel zonabandung.com (2022), DPRD Kota Bandung bersama Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung melakukan pembahasan realisasi kerja T.A 2021. Anggota Pansus 1, H. Rizal Khairul, SIP., M.Si., menyampaikan persoalan internal masih menjadi kendala yang belum dibenahi secara serius setiap tahunnya.

"BUMD Kota Bandung harus melakukan pembenahan di bagian SDM. Permasalahan BUMD sering kali dipicu karena adanya persoalan internal yang masih rumit untuk diselesaikan. Sehingga banyak inovasi serta program-program yang menjanjikan baik *income* maupun *outcome* menjadi tersendat, tapi itu semua saya rasa masih belum terlambat untuk segera dibenahi dan harus segera dievaluasi dengan baik" kata Rizal, pada Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) 1 membahas realisasi kinerja T.A 2021 di Ruang Rapat Badan Musyawarah, Jumat 22 April 2022. Menanggapi laporan LKPJ setiap dewan pengawas Wakil Ketua Pansus 1, Riana mengatakan bahwa semua permasalahan BUMD berkaitan dengan disharmonisasi dan menanggapi bahwa hasil laporan yang disampaikan Perumda Tirtawening tidak selaras dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat (DPRD Bandung, 2022).

Selanjutnya fenomena lain yang melibatkan Kinerja BUMD Kota Bandung terdapat pada artikel dprd.bandung.go.id (2020) Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Kota Bandung, meminta agar BUMD untuk melakukan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan profit atau keuntungan dengan tetap tidak mengabaikan prinsip sosial di masyarakat. Anggota Pansus 4 DPRD Kota Bandung, Nenden Sukaesih

Robithoh Muliati, 2023

PENGARUH DESENTRALISASI DAN KARAKTERISTIK INFORMASI SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI EMPIRIS PADA BUMD KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menyoroti PD. Pasar yang dianggap belum maksimal dalam menggali potensi pasar-pasar tradisional di Kota Bandung dan meminta untuk memperbaiki kinerja manajemen pasar-pasar Kota Bandung (DPRD Bandung, 2020).

“Salah satu yang prihatin yaitu Pasar Cihaurgeulis, karena pedagangnya sampai tumpah ruah ke jalan. Maka kita berharap adanya perbaikan kinerja manajemen pasar-pasar di Kota Bandung” kata Nenden Sukaesih pada Rapat Kerja terkait Pembahasan Realisasi Kinerja dari Hasil Perusahaan Milik Daerah T.A. 2019 di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (8/5/2020).

Kinerja merupakan suatu gambaran pencapaian pelaksanaan pada kegiatan, program, serta kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan misi organisasi (Meirina et al., 2020). Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah. Menurut (Handoko, 2011) kinerja manajerial merupakan sebuah kinerja individu dari anggota organisasi dalam kegiatan manajemen, seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Kinerja manajerial tersebut dapat dilihat dari kecakapan manajer dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, dengan menggunakan anggaran sebagai salah satu yang digunakan dalam peningkatan kinerja manajerial (Tridianty Sianipar. R, 2020). Selisih-selisih yang timbul dari analisis tersebut dapat menunjukkan prestasi dari manajer dan dapat membantu dalam mengidentifikasi kegiatan pokok dalam mencapai tujuan (Lasmana. A, 2017). Menurut data yang diperoleh dari PPID Kota Bandung mencatatkan bahwa realisasi yang didapatkan pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih belum menyentuh target anggaran yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Bandung. Berikut merupakan daftar pendapatan daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Bandung.

Tabel 1.1 Efektivitas Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
2018	66.902.854.788	10.771.957.542	(56.130.897.246)	16,10
2019	80.040.000.000	10.477.350.536	(69.562.649.464)	13,09
2020	27.740.800.000	13.134.333.115	(14.606.466.885)	47,35
2021	18.885.582.468	15.777.448.799	(3.108.133.669)	83,54

Sumber : (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset dan Daerah Kota Bandung, Data diolah, 2021)

Penggunaan anggaran merupakan konsep yang sering dipergunakan dalam melihat kinerja organisasi publik yang mana anggaran yang disusun harus berjalan dengan pendekatan kinerja (Hidayat, 2014). Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih belum menyentuh jumlah target anggaran yang ditetapkan. Hingga tujuan pemerintah daerah pada poin memperoleh laba dan/atau keuntungan dalam membentuk BUMD masih belum tercapai secara maksimal. Berikut rincian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019-2020.

Tabel 1.2 Efektivitas Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019

No	BUMD	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	PDAM Tirtawening	67.140.000.000	0	0,00	0
2	Bank BJB	11.000.000.000	10.370.400.536	94,28	10.474.800.542
3	PD. Bank Bandung	850.000.000	0	0,00	0
4	PD. Pasar Bermartabat	750.000.000	0	0,00	0
5	KPKB	300.000.000	106.950.000	35,65	297.157.00
	Jumlah	80.040.000.000	10.477.350.536	13,09	10.771.957.542

Sumber : (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung, 2019)

Berdasarkan data realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019 terdapat 2 dari 5 perusahaan BUMD yang memberikan

Robithoh Muliati, 2023

PENGARUH DESENTRALISASI DAN KARAKTERISTIK INFORMASI SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI EMPIRIS PADA BUMD KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

deviden senilai Rp 10.477.350.536,- atau turun dari jumlah setoran pada tahun sebelumnya senilai Rp 10.771.957.542,-. Dengan jumlah setoran yang berkontribusi pada target anggaran PAD Kota Bandung sekitar 13,09%. Dari 2 perusahaan tersebut yaitu Bank BJB dan KPKB yang tercatat mengalami penurunan laba masing-masing sebesar 1,00% dan 64,01%. Kemudian PDAM Tirtawening, PD. Bank Bandung dan PD. Pasar Bermartabat tidak mampu memberikan deviden, sehingga target pendapatan deviden tahun 2019 tidak tercapai.

Tabel 1.3 Efektivitas Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020

No	BUMD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	PDAM Tirtawening	11.919.800.000	0	0,00	0
2	Bank BJB	11.000.000.000	10.906.320.564	99,15	10.370.400.536
3	PD. Bank Bandung	1.500.000.000	1.740.648.551	116,04	0
4	PD. Pasar Bermartabat	3.000.000.000	0	0,00	0
5	KPKB	321.000.000	487.364.000	151,83	106.950.000
	Jumlah	27.740.800.000	13.134.333.115	47,35	10.477.350.536

Sumber : (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung, 2020)

Berdasarkan data realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 terdapat 3 dari 5 perusahaan BUMD yang memberikan deviden senilai Rp 13.134.333.115,- atau mengalami kenaikan dari jumlah setoran pada tahun sebelumnya senilai Rp 10.477.350.536,-. Dengan jumlah setoran yang berkontribusi pada target anggaran PAD Kota Bandung sekitar 47,35%. Dari 3 perusahaan tersebut yaitu Bank BJB dan KPKB yang tercatat mengalami kenaikan laba masing-masing sebesar 5,17% dan 355,69%. Lalu PD. Bank Bandung yang berhasil memberikan deviden sebesar Rp 1.740.648.551 dan melebihi dari jumlah anggaran sebesar 116,04%. Kemudian PDAM Tirtawening dan PD. Pasar Bermartabat tidak mampu memberikan deviden, sehingga target pendapatan deviden tahun 2019 tidak tercapai.

Dimulai tahun 2021 perusahaan BUMD Kota Bandung yang terdaftar terdiri dari PDAM Tirtawening, PD. Bank Bandung, PD. Pasar Bermartabat dan PT Bandung Infra Investama. Seperti yang disebutkan pada artikel radarpena.fin.co.id (2022) Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana memberhentikan sejumlah jajaran direksi PD. Bank Bandung yaitu ketua dewan pengawas, direktur utama dan direktur operasional. Dengan hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan oleh badan pengawas dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menilai dari banyak faktor, seperti faktor rasio ataupun perbankan yang ujungnya menyampaikan bahwa dari sisi performa PD. Bank Bandung kurang baik. Selain itu pemberhentian dilihat dari performa PD. Bank Bandung relatif dari sisi keuangan tidak memberikan deviden ke pemkot sebagai pemilik, dengan hasil evaluasi Rencana Kerja Perusahaan (RKP) yang menunjukkan performa kurang baik.

Hal tersebut diperjelas dari hasil diskusi yang dilakukan dengan salah satu pihak PD. Bank Bandung bahwa salah satu Perumda Kota Bandung ini berbeda dengan perumda lainnya. Yang mana bahwa PD. Bank Bandung bukan hanya harus fokus dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, namun harus mampu bersaing dengan perusahaan swasta pada bidang keuangan lainnya. Seorang pimpinan atau manajemen di dapat dikategorikan baik apabila mereka mampu membuat perencanaan yang dibuat terealisasi secara maksimal dan hal tersebut juga juga dialami oleh PD. Bank Bandung yang mana belum mampu memaksimalkan perencanaan dan inovasi dalam mengembangkan perusahaan tersebut.

Menurut hasil penilaian atas kinerja direksi mengenai pengelolaan bank pada Laporan Auditor Independen (LAI) PD. Bank Bandung, bahwa direksi belum optimal dalam menjalankan Tata Kelola Perbankan yang baik. Hal tersebut terlihat dari turunnya nilai Aset sebesar 18,69% di tahun 2021 atau Rp 199.397.352.707,28 dibanding tahun sebelumnya, atau mencapai 68,32% terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021 dan tercatatnya rugi sebesar Rp 13,61 miliar. Yana Mulyana menyebutkan bahwa tahun-tahun ini tidak ada penyertaan modal untuk BUMD. Keputusan tersebut dilakukan untuk memberikan himbuan untuk memperbaiki atau memulihkan kembali manajemen BUMD masing-masing (Redaktur, 2022).

Robithoh Muliati, 2023

PENGARUH DESENTRALISASI DAN KARAKTERISTIK INFORMASI SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI EMPIRIS PADA BUMD KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kesuksesan suatu perusahaan juga bergantung pada kinerja manajerial, apabila kinerja manajerial mengalami peningkatan, maka secara bersamaan kinerja perusahaan akan ikut meningkat secara keseluruhan (Febrianti & Fitri, 2019). Kinerja manajerial dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan apabila kinerja manajerial mengalami peningkatan, maka secara bersamaan kinerja perusahaan akan ikut meningkat secara keseluruhan (Irawati & Ardianshah, 2018). Kinerja manajerial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantara-Nya adalah karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen (ISAM) dan desentralisasi (Syahputri et al., 2020).

Teori kontingensi merupakan salah satu teori manajemen, terutama sebagai salah satu teori perilaku yang menegaskan bahwa tidak ada cara tertentu untuk mengelola perusahaan dalam mengambil keputusan dalam organisasi (Anwar, 2015). Melalui pendekatan kontingensi ini ada kemungkinan desentralisasi, sistem akuntansi manajemen dan kapasitas sumber daya manusia pada masing-masing organisasi menyebabkan perbedaan kebutuhan karakteristik terhadap kinerja manajerial (Wijaya, 2021).

Menurut Mulyadi (2015) memberikan pengertian bahwa desentralisasi yaitu organisasi yang pembuatan keputusannya tidak diserahkan kepada beberapa eksekutif puncak tetapi diserahkan di seluruh organisasi, dengan manajer di berbagai tingkatan membuat keputusan penting yang berhubungan dengan lingkup tanggung jawab mereka. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah bahwa penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Pemerintah Indonesia, 2014). Dengan adanya desentralisasi, para manajer diberikan hak untuk mengambil keputusan penting sesuai bidang dan lingkup tanggung jawab (Ardiany et al., 2021). Semakin kompleksnya pekerjaan, administratif, tugas dan tanggung jawab di sebuah organisasi, semakin peranan desentralisasi pada pendelegasian wewenang diperlukan. Pendelegasian wewenang tersebut dapat meringankan beban kerja manajemen yang lebih tinggi (Wijaya, 2021). Hal ini dapat disimpulkan, bahwa dengan semakin tinggi tingkat

desentralisasi maka semakin tinggi wewenang manajer dalam mengambil keputusan secara otonom.

Akuntansi manajemen merupakan jaringan penghubung yang sistematis dalam penyajian informasi yang berguna dan dapat daya untuk membantu pimpinan perusahaan dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Prananda & Datu, 2016). Sistem akuntansi manajemen merupakan prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk mempertahankan dan menyediakan alternatif dari berbagai kegiatan perusahaan (Wijayanti, 2018). Dalam upaya meningkatkan kinerja suatu perusahaan khususnya manajerial membutuhkan informasi akuntansi manajemen yang terarah dan terintegrasi dengan baik. Kegagalan akuntansi keuangan dalam menyajikan informasi yang berguna untuk memprediksi kondisi perusahaan menyebabkan kebutuhan akan informasi akuntansi manajemen menjadi suatu yang tidak dapat dihindari, karena sistem akuntansi manajemen dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di setiap fungsi manajemen (IAI, 2020). Perencanaan sistem informasi akuntansi manajemen merupakan anggota bagian dari sistem pengendalian organisasi yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga diharapkan bisa memberikan tindakan kontribusi positif dalam mendukung keberhasilan sistem pengendalian organisasi (Sustyorini & Zuliyatin, 2021).

Kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu perusahaan tergantung pada sistem informasi akuntansi manajemen (Suryani, 2013). Chenhall dan Morris (1986) mengidentifikasi informasi sistem akuntansi yang baik bagi perusahaan adalah informasi yang sesuai dengan karakteristik yaitu *broadscope* yaitu mengacu pada dimensi fokus, kuantifikasi dan horizon waktu, *timeliness* menyatakan ketepatan waktu dalam memperoleh informasi mengenai suatu kejadian, *aggregate* merupakan ringkasan informasi menurut fungsi, periode waktu, dan model keputusan, dan *integrated* aspek pengendalian suatu organisasi yang penting adalah koordinasi berbagai segmen dalam sub-sub organisasi. Karakteristik informasi yang tersedia dalam organisasi pada perusahaan akan menjadi efektif apabila mendukung kebutuhan pengguna informasi akan pengambilan keputusan (Atmaja, 2017).

Robithoh Muliati, 2023

PENGARUH DESENTRALISASI DAN KARAKTERISTIK INFORMASI SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI EMPIRIS PADA BUMD KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada pendekatan kontingensi bahwa tingkat ketersediaan pada karakteristik informasi sistem akuntansi tidak selalu sama untuk setiap organisasi namun pada beberapa faktor tertentu akan mempengaruhi tingkat kebutuhan terhadap informasi akuntansi manajemen (Wijayanti, 2018). Tingkat desentralisasi akan mempengaruhi tingkat kebutuhan terhadap karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen (Fitri, 2019). Dampak interaksi antara sistem akuntansi manajemen dengan desentralisasi akan selalu berhadapan secara signifikan dalam suatu organisasi (Islam, 2020). Kesesuaian antara informasi dengan kebutuhan pembuat keputusan akan mendukung kualitas keputusan yang akan diambil dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Wuryani & Pantja Djati, 2007).

Pada penelitian terdahulu, tentang pengaruh desentralisasi dan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial mempunyai hasil yang berbeda-beda. Untuk hasil pengaruh antara desentralisasi terhadap kinerja manajerial, terdapat hasil yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Penelitian terdahulu yang mempunyai hasil berpengaruh adalah penelitian yang dilakukan oleh Herman Wijaya (2021) menyimpulkan bahwa desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada industri percetakan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andika Rante (2016) dengan hasil bahwa desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial dan penelitian yang dilakukan oleh Jilie Maria Senduk (2017) dengan hasil penelitian yang sama. Sedangkan penelitian terdahulu yang mempunyai hasil tidak berpengaruh adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuli Ardiany, Jhon Rinaldo, dan Tia Muliani (2021) yang menemukan bahwa desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial di PT. P&P Lembah Karet Padang.

Karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen menurut Chenhall dan Morris (1986), memiliki empat informasi yang baik bagi perusahaan yang terdiri dari *broadscope*, *timeliness*, *aggregate*, dan *integrated*. Masing-masing karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen mempunyai hasil penelitian yang berbeda-beda. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Qari Nur Islami dan Rulfah M. Daud (2021) mengungkapkan bahwa *broadscope* berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada 22 perusahaan BUMN Banda Aceh. Penelitian ini

Robithoh Muliati, 2023

PENGARUH DESENTRALISASI DAN KARAKTERISTIK INFORMASI SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI EMPIRIS PADA BUMD KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kesumawati et al., 2019) dan (Senduk et al., 2017) bahwa informasi *broadscope* memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Namun menurut penelitian yang dilakukan Sukma Wijayanti (2018) memiliki hasil penelitian yang berbeda, dengan hasil bahwa *broadscope* tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Qari Nur Islami dan Rulfah M. Daud (2021) mengungkapkan bahwa *timeliness* berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada 22 perusahaan BUMN Banda Aceh. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azzumar et al., 2018) dan (Senduk et al., 2017).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Qari Nur Islami dan Rulfah M. Daud (2021) mengungkapkan bahwa *aggregate* berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada 22 perusahaan BUMN Banda Aceh. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kesumawati et al., 2019) dan (Missah et al., 2019).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ranti Melasari (2018) mengungkapkan bahwa desentralisasi dan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja manajerial Pt. Sinar Mas Kempas Jaya. Dan penelitian yang dilakukan Yuli Ardiany (2021) memiliki hasil penelitian yang berbeda, dengan hasil bahwa desentralisasi dan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena terkait BUMD Kota Bandung di atas, serta penelitian terdahulu dengan hasil yang berbeda-beda maka diperlukan penelitian kembali tentang desentralisasi dan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. Maka dari itu peneliti mengambil penelitian dengan judul “**Pengaruh Desentralisasi Dan Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada BUMD Kota Bandung)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah desentralisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial pada BUMD Kota Bandung?.
2. Apakah karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen *broadscope* memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial pada BUMD Kota Bandung?.
3. Apakah karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen *timeliness* memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial pada BUMD Kota Bandung?.
4. Apakah karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen *aggregation* memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial pada BUMD Kota Bandung?.
5. Apakah karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen *integration* memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial pada BUMD Kota Bandung?.
6. Apakah desentralisasi dan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen yang terdiri dari *broadscope*, *timeliness*, *aggregation* dan *integration* memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial pada BUMD Kota Bandung?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian adalah. Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan maka penelitian ini bertujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial pada BUMD Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen *broadscope* terhadap kinerja manajerial pada BUMD Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen *timeliness* terhadap kinerja manajerial pada BUMD Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen *aggregation* terhadap kinerja manajerial pada BUMD Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen *integration* terhadap kinerja manajerial pada BUMD Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi dan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen yang terdiri dari *broadscope*, *timeliness*, *aggregation* dan *integration* terhadap kinerja manajerial pada BUMD Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis untuk berbagai pihak yang berkepentingan sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang akuntansi di bidang akuntansi manajemen tentang pengaruh desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat dalam bidang akademik khususnya mengenai pengkajian terkait perusahaan daerah dan akuntansi manajemen.

2. Secara Praktisi

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan praktis bagi organisasi perusahaan yang terdaftar di BUMD Kota Bandung untuk meningkatkan kinerja manajerial yang berkenaan dengan desentralisasi serta karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Simpulan dan Saran. Dengan deskripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka atau landasan teori yang mendasari penelitian yang diambil dari berbagai sumber literatur yang membantu dalam penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan pengujian hipotesis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil analisis yang telah dilakukan.